

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2013

Komposisi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) relatif kecil. Hal ini tercermin dari prosentase PAD terhadap jumlah pendapatan daerah hanya sebesar 7,88 persen atau yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total PAD pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2013 adalah Rp. 118.738.912. 537,-.

Perkembangan pendapatan daerah dari sisi dana perimbangan pada perubahan APBK tahun Anggran 2013 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 125.155.305.401- yang diakibatkan oleh naiknya dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.878.779.900.- dikarenakan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Jumlah keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.534.263.257.187,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp.118.738.912. 537,- dan dana perimbangan sebesar Rp. 1.277.179.319.750,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 138.345.024.900,-

2.1.2. Target pendapatan daerah tahun 2013

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp. 118.738.912. 537,- dari posisi sebelum perubahan sebesar Rp. 113.747.660.400,-. atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.991.252.137,-

2.1.3. Strategi pemerintah daerah dalam mencapai target PAD

Dalam upaya mencapai target pendapatan yang ditetapkan, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menempuh beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menumbuhkan komitmen yang tinggi pada instansi pengelola PAD di masing-masing sektor sehingga dapat meminimalkan tingkat kebocoran PAD.
3. Melakukan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehubungan dengan banyaknya perubahan objek dan subjek pajak baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data objek dan subjek pajak yang akurat sangat mendukung upaya pemungutan PBB tepat secara optimal.
4. Melakukan konsolidasi antara instansi yang mengelola PAD dengan TP di kecamatan dalam melaporkan pendapatan/penyetoran Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) untuk memudahkan pemantauan tentang pelunasannya dan penyusunan BPHTB per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
5. Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah salah satunya dengan cara membangun pos-pos pengutipan

Pajak Galian Golongan C di beberapa kecamatan yang potensial untuk jenis pajak ini.

2.2. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 42.097.311.891,-. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000,-. Pembiayaan netto sebesar Rp. 40.097.311.891- yang digunakan untuk menutupi defisit.



TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2013

NO	PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.362.237.919.749	1.534.263.257.187	172.025.337.438
1.1	Pendapatan Asli Daerah	113.747.660.400	118.738.912.537	4.991.252.137
1.1.1	Pajak Daerah	15.866.348.000	14.396.348.000	(1.470.000.000)
1.1.2	Retribusi Daerah	53.958.873.727	66.793.108.982	12.834.235.255
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.870.000.000	14.242.726.830	2.372.726.830
1.1.4	Zakat	7.000.000.000	7.000.000.000	-
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.052.438.673	16.306.728.725	(8.745.709.948)
1.2	Dana Perimbangan	1.152.024.014.349	1.277.179.319.750	125.155.305.401
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil yang Bukan Pajak	405.381.286.349	530.536.591.750	125.155.305.401
1.2.2	Dana Alokasi Umum	690.327.098.000	690.327.098.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	56.315.630.000	56.315.630.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.466.245.000	138.345.024.900	41.878.779.900
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.037.551.000	17.182.011.900	1.144.460.900
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	15.000.000.000	15.000.000.000
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.428.694.000	106.163.013.000	25.734.319.000
2	Belanja Daerah	1.358.036.919.749	1.574.360.569.078	216.323.649.329
2.1	Belanja Tidak Langsung	799.465.830.662	855.540.637.781	56.074.807.119
2.1.1	Belanja Pegawai	704.130.728.612	740.457.282.018	36.326.553.406
2.1.2	Belanja Bunga	1.600.000.000	-	(1.600.000.000)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	5.624.929.332	5.624.929.332
2.1.4	Belanja Hibah	26.610.630.000	42.368.521.012	15.757.891.012
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.082.224.000	9.547.657.369	(1.534.566.631)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan PemDes	54.042.248.050	54.042.248.050	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000
	Belanja Langsung	558.571.089.087	718.819.931.297	160.248.842.210
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.201.000.000	(40.097.311.891)	(44.298.311.891)
3	Pembiayaan Daerah	-	-	(0)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.799.000.000	42.097.311.891	24.298.311.891
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	17.799.000.000	42.097.311.891	24.298.311.891
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	22.000.000.000	2.000.000.000	(20.000.000.000)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	-
3.2.5	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000	-	(20.000.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	(4.201.000.000)	40.097.311.891	44.298.311.891
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	(0)